

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI DASAR PERDAMAIAN DALAM PEMBELAJARAN  
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

IMPLEMENTATION OF THE FUNDAMENTAL VALUES OF PEACE IN THE  
PANCASILA AND CIVIC EDUCATION LEARNING

Ruslan\*, Sanusi Sanusi, Widia Safitri

Universitas Syiah Kuala

Jalan Teuku Nyak Arief Nomor 441 Banda Aceh 23111, Indonesia

INFO ARTIKEL

**Riwayat Artikel:**

Diterima : 03 April 2021

Disetujui : 16 Desember 2021

**Keywords:**

implementation, fundamental values of peace, learning

**Kata Kunci:**

implementasi, nilai dasar perdamaian, pembelajaran

**\*) Korespondensi:**

E-mail: [ruslan@unsyiah.ac.id](mailto:ruslan@unsyiah.ac.id)

**Abstract:** this study aimed to analyze the fundamental values of peace education and the implementation of the fundamental values of peace in Pancasila and Citizenship Education learning and its obstacles. This study used a descriptive qualitative approach to find out and describe the meaning behind implementing the basic values of peace. The fundamental concept of peace education consisted of twelve values, namely: (a) self-acceptance, (b) prejudice, (c) ethnic differences, (d) religious differences, (e) gender differences, (f) differences in economic status, (g) group differences, (h) diversity, (i) conflict, (j) reject violence, (k) admit mistakes, (l) forgive. Implementing the fundamental values of peace in learning was done by modifying the Learning Implementation Plan, models, media, and teaching materials according to reality or factual nature. Barriers to the implementation of the basic values of peace in learning were related to the ability of teachers to understand the fundamental values of peace, the low interest in student learning, and the lack of facilities and infrastructure to support the learning process.

**Abstrak:** tujuan kajian ini yaitu untuk menganalisis konsep nilai-nilai dasar pendidikan perdamaian dan implementasi nilai-nilai dasar perdamaian pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan beserta hambatan-hambatannya. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif, untuk mengetahui dan mendeskripsikan makna dibalik implementasi nilai-nilai dasar perdamaian. Konsep dasar pendidikan perdamaian terdiri atas dua belas nilai, yaitu: (a) menerima diri sendiri, (b) prasangka, (c) perbedaan etnis, (d) perbedaan agama, (e) perbedaan jenis kelamin, (f) perbedaan status ekonomi, (g) perbedaan kelompok, (h) keanekaragaman, (i) konflik, (j) menolak kekerasan, (k) mengakui kesalahan, (l) memberi maaf. Implementasi nilai-nilai dasar perdamaian dalam pembelajaran dilakukan dengan memodifikasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), model, media, dan bahan ajar sesuai dengan realita atau bersifat faktual. Hambatan dalam implementasi nilai-nilai dasar perdamaian pada pembelajaran yaitu berkaitan dengan kemampuan guru dalam memahami nilai-nilai dasar perdamaian, rendahnya minat belajar siswa, serta kurangnya sarana dan prasarana sebagai penunjang proses pembelajaran.

PENDAHULUAN

Pendidikan mempunyai peran dan kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa. Pendidikan merupakan tempat pengembangan ilmu pengetahuan serta sebagai sarana dalam

membangun watak dan peradaban bangsa. Pendidikan merupakan proses bagi suatu bangsa dalam mempersiapkan generasi muda untuk menjalankan kehidupan serta memenuhi tujuan hidup secara efektif dan efisien (Mardhiah, 2016).

Pendidikan tidak hanya sekedar pengajaran tetapi merupakan proses bagi suatu bangsa atau negara untuk membina dan mengembangkan kesadaran diri masing-masing individu.

Pendidikan di Indonesia mengalami beberapa penyimpangan dalam implementasinya. Kekerasan merupakan salah satu contoh penyimpangan yang terjadi dalam dunia pendidikan, baik dari guru terhadap siswa, siswa terhadap guru, atau sesama siswa. Sekretaris Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa dalam jangka waktu 9 tahun mulai 2011 hingga 2019 terdapat 37.381 pengaduan kekerasan terhadap anak. Kasus *bullying* baik di sekolah maupun sosial media mencapai 2.473 kasus yang terus meningkat. Aksi tawuran dan kekerasan (*bullying*) yang dilakukan oleh siswa di sekolah menjadi bukti lunturnya nilai-nilai kemanusiaan dalam diri sebagian pelajar di Indonesia (Sa'diyah, 2021). Perilaku *bullying* merupakan tindakan negatif yang dilakukan secara berulang oleh siswa, dengan bertindak kasar, mencaci, mengejek dan memberi julukan, hingga berujung pada perkelahian. *Bullying* dapat berupa kekerasan yang kompleks seperti penganiayaan, perusakan fasilitas umum, hingga pembunuhan.

Konflik serius yang terjadi di Indonesia tentu membuat masyarakat resah. Konflik yang dimaksud seperti konflik separatis di Aceh dan Papua serta konflik antar golongan di Kalimantan, Sulawesi Tengah, dan Maluku. Kekerasan muncul dengan cara yang sebelumnya belum pernah terjadi dalam masyarakat. Konflik tersebut membuat setiap orang merasa takut terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan oleh manusia terhadap manusia maupun alam (Mardhiah, 2020). Konflik dapat terjadi dalam bentuk terorisme, perang, kejahatan, ketidakadilan, penindasan, dan eksploitasi. Dampak dari kekacauan di masyarakat dapat mempengaruhi pikiran anak-anak yang tidak bersalah. Anak-anak secara alami akan menyerap semangat kekerasan, kemudian tumbuh menjadi generasi penerus pelaku kekerasan.

Kebutuhan untuk memelihara perdamaian di hati anak-anak telah muncul sebagai masalah yang harus segera ditangani. Pendidikan sangat berkontribusi untuk membangun budaya damai serta menciptakan demokrasi dan toleransi (Siregar, 2013). Kekerasan dalam dunia pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu: (a) kurangnya pengetahuan bahwa kekerasan

tidak efektif untuk memotivasi atau mengubah perilaku siswa, (b) persepsi yang parsial menilai siswa, (c) adanya hambatan psikologis, sehingga dalam mengelola masalah guru lebih sensitif dan reaktif, (d) adanya tekanan kerja serta target yang harus dipenuhi oleh guru, sedangkan kendala yang harus dihadapi cukup besar, (e) pola yang dianut adalah mengedepankan faktor kepatuhan dan ketaatan siswa, (f) muatan kurikulum hanya menekankan pada kemampuan kognitif dan cenderung mengabaikan kemampuan efektif, (g) tekanan ekonomi.

Pendidikan perdamaian sebagai pengembangan kapasitas reflektif dan kontribusi untuk mencapai dan memelihara perdamaian. Tujuan utama pendidikan perdamaian adalah untuk membangun perdamaian antar umat manusia, hubungan interpersonal, kelompok, negara, masyarakat dan budaya (Sa'diyah & Nurhayati, 2019). Tujuan pendidikan perdamaian yaitu memeriksa ketakutan, memperoleh pengetahuan tentang sistem keamanan, memahami kekerasan, mengembangkan pemahaman antar budaya, mempromosikan keadilan sosial dengan perdamaian, mendorong rasa hormat untuk hidup, dan mengakhiri kekerasan.

Pendidikan perdamaian yaitu pendidikan anti kekerasan yang mencakup pelatihan, keterampilan, dan informasi untuk menumbuhkan budaya perdamaian berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pendidikan perdamaian bertujuan untuk menanamkan keterampilan dan sikap yang diperlukan secara aktif dalam mempromosikan serta membangun budaya perdamaian tanpa kekerasan. *United Nations of Education, Scientific and Cultural Organization* (UNESCO) pada tahun 1974 telah mengambil langkah untuk mengembangkan pendidikan sebagai suatu pendekatan yang utuh. Pendidikan harus memuat pemahaman, kerjasama, dan perdamaian yang berkaitan dengan hak asasi manusia serta kebebasan fundamental (Arslan, Alabay, & Polat, 2015). Wujud dari pernyataan UNESCO dilaksanakan dalam bentuk konstitusi yang berisi perintah untuk membangun budaya perdamaian dalam setiap pemikiran orang yang hidup di dunia (*in the minds of men*).

Budaya perdamaian (*culture of peace*) menurut UNESCO merupakan bagian dari nilai, sikap, perilaku, dan cara hidup yang didasarkan pada penolakan kekerasan dan hormat terhadap hak asasi manusia. Budaya perdamaian berkaitan dengan kebebasan, pemahaman, toleransi,

solidaritas, saling berbagi, bebas memperoleh informasi, penuh partisipasi, serta kesempatan yang sama bagi wanita (Khokhar, 2017). Program Pendidikan Damai (PPD) lahir sebagai cabang *Nonviolence International Washington DC* pada Oktober 2000 setelah pertemuan *Charman Nonviolence International Dr. Mubarak Awad* dengan Direktur UNICEF Indonesia di Jakarta. Pendidikan damai pada dasarnya berpandangan bahwa setiap manusia terlahir dengan membawa potensi yang sama. Potensi bawaan ini yang selanjutnya ditumbuhkembangkan melalui pendidikan dan pembelajaran. Potensi tersebut terdiri atas potensi otak kiri atau daya nalar, otak kanan atau daya imajinatif, otak untuk aktivitas motorik atau gerak, serta hati dan mental untuk hidup bersama.

Pendidikan perdamaian di lingkungan sekolah dapat diwujudkan melalui kegiatan belajar yang memberi ruang kepada siswa untuk menerapkan nilai atau prinsip-prinsip perdamaian, seperti penghargaan, kasih sayang, toleransi, dan kerjasama dengan orang lain. Sosialisasi nilai perdamaian di lingkungan sekolah dinilai sangat efektif (Kasriadi, 2018). Nilai-nilai perdamaian harus diajarkan dan diintegrasikan dalam kurikulum sekolah. Nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui pembelajaran interaktif di bidang penelitian kelas atau melalui interaksi edukatif di lingkungan sekolah.

Pendidikan perdamaian perlu diberikan pada setiap jenjang pendidikan. Manusia secara alamiah berkembang melalui proses belajar. Pendidikan diharapkan mampu memberikan solusi untuk mewujudkan situasi yang damai dan tidak mengandung unsur kekerasan, baik di lingkungan sekolah, keluarga, atau masyarakat (Murtiningsih & Komalasari, 2017). Kesadaran lembaga pendidikan terkait keberagaman masyarakat sangat diharapkan, salah satunya melalui pendidikan perdamaian. Pendidikan perdamaian diharapkan mampu melahirkan generasi yang menyadari dan memahami keberagaman dalam kehidupan, baik secara mikro yaitu sekolah dan keluarga maupun secara makro dalam lingkup bangsa dan negara.

Konsep pendidikan yang dikenal dengan pendidikan perdamaian (*peace education*) menjadi salah satu jembatan dalam menyelesaikan problematika dalam dunia pendidikan khususnya berkaitan dengan kekerasan. Pemahaman tentang nilai-nilai kehidupan yang selalu ditampilkan

dalam konsep pendidikan perdamaian harus dimiliki oleh guru dan siswa (Matnuh & Adawiah, 2020). Persamaan perspektif antara guru dan siswa secara tidak langsung dapat menimbulkan hubungan emosional yang erat dan mengarah pada kerjasama yang positif untuk mencapai tujuan pendidikan seutuhnya.

Implementasi tidak hanya berupa aktivitas, tetapi mencakup kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Guru sangat berperan dalam pelaksanaan pendidikan untuk mewujudkan perdamaian, karena guru berinteraksi langsung dengan siswa. Guru memegang tanggung jawab yang besar dalam proses pembentukan karakter dan sikap siswa. Pendidikan perdamaian melibatkan siswa dan guru dalam proses perubahan, yang saling berkontribusi untuk berperilaku berorientasi pada perdamaian dan rekonsiliasi (Lincoln & Amalee, 2017). Kontribusi ini dapat membentuk suasana yang berorientasi pada solusi ketika terdapat konflik secara fungsional di lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan mencakup proses pengajaran dan pengembangan kualitas hidup.

Sekolah saat ini ingin menghasilkan warga negara yang benar-benar global. Hal ini menjadi beban berat bagi pendidik untuk merangsang pemikiran kritis terkait permasalahan yang sedang terjadi. Permasalahan tersebut diantaranya seperti perang dan perdamaian, konflik ketidaksetaraan global, serta masalah gender dan ras. Pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM), pendidikan multikultural, pendidikan kewarganegaraan global, dan pendidikan resolusi konflik termasuk dalam lingkup pendidikan perdamaian dengan pendekatan yang berbeda di lapangan (Darmawan, 2019). Pendidikan perdamaian sangat kontekstual dan sering disesuaikan dengan peraturan di wilayah tertentu, tetapi tujuan dasarnya sama yaitu perdamaian.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan mata pelajaran dengan aspek moral di sekolah yang mempunyai tugas membentuk warga negara yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). PPKn dalam program Kurikulum 2013 mengemban tugas membentuk warga negara yang cerdas dan unggul. Pembangunan karakter menjadi misi utama PPKn di sekolah. Mata

pelajaran warga negara berhubungan langsung dengan perkembangan bangsa-bangsa ini. PPKn merupakan salah satu mata pelajaran pokok di sekolah yang bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan warga negara dalam dimensi spiritual, emosional, dan sosial (Laili, Dayati, & Rochmadi, 2021). PPKn diselenggarakan untuk mengembangkan tanggung jawab sebagai warga negara serta mengembangkan siswa untuk berpartisipasi sebagai warga negara yang baik.

Guru menjadi orang pertama yang menciptakan suasana positif dan budaya damai di sekolah. Guru harus memiliki kesadaran dan menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian, sebelum menciptakan suasana damai agar siswa memiliki perilaku positif (Kemendiknas, 2011). Guru tidak hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi juga bertanggung jawab terhadap perkembangan karakter dan kepribadian siswa. Kerjasama, kasih sayang, dan saling menghargai merupakan sebagian dari nilai positif yang harus dimiliki dan dipraktikkan oleh seorang guru, baik untuk diri sendiri maupun orang lain di sekitarnya.

Sikap saling menghargai terhadap sesama diwujudkan dalam bentuk kesadaran bahwa setiap siswa memiliki keunikan dan potensi masing-masing. Guru harus memberi kesempatan kepada siswa untuk menyadari kekurangan dan memperbaiki kesalahan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki (Astuti, 2015). Berdasarkan uraian di atas maka kajian ini membahas beberapa rumusan masalah, yaitu konsep nilai-nilai dasar pendidikan perdamaian, implementasi nilai-nilai dasar perdamaian dalam pembelajaran, serta hambatan dalam implementasi nilai-nilai dasar perdamaian pada pembelajaran

## METODE

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif, dengan subjek kajian yaitu guru pengampu mata pelajaran PPKn pada enam SMP di Kecamatan Samadua dan Tapak Tuan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi dokumen. Wawancara dilakukan secara langsung dengan guru terkait kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan, serta persepsi terhadap pengimplementasian nilai-nilai dasar perdamaian dalam pembelajaran. Analisis data dilakukan dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (Emzir, 2011). Reduksi data

dilakukan dengan merangkum dan menganalisis hasil temuan selama penelitian. Penyajian data dilakukan dengan merekonstruksikan hasil reduksi data dalam bentuk penyajian berdasarkan indikator agar lebih mudah dipahami. Verifikasi dilakukan sebagai tahap akhir dalam menyusun hasil temuan sebagai suatu kesimpulan dari pokok bahasan dalam kajian.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsep Nilai-Nilai Dasar Pendidikan Perdamaian

Nilai-nilai dasar perdamaian adalah nilai yang membahas tentang upaya menciptakan lingkungan yang aman tanpa adanya diskriminasi dan kekacauan. Nilai-nilai dasar perdamaian sekarang ini telah dimodifikasi dalam suatu pembelajaran yang harus diterapkan oleh guru kepada siswa. Pendidikan perdamaian meliputi dua belas nilai dasar yang dijadikan sebagai materi ajar *peace generation* (Lincoln & Amalee, 2017). Pendidikan perdamaian terdiri atas dua belas nilai, yaitu: (a) menerima diri sendiri, (b) prasangka, (c) perbedaan etnis, (d) perbedaan agama, (e) perbedaan jenis kelamin, (f) perbedaan status ekonomi, (g) perbedaan kelompok, (h) keanekaragaman, (i) konflik, (j) menolak kekerasan, (k) mengakui kesalahan, (l) memberi maaf.

Prinsip menerima diri memiliki lima dasar pemikiran, yang pertama menjelaskan bahwa setiap orang diciptakan dengan beberapa karakteristik baik yang positif atau negatif serta dapat diubah atau tidak dapat diubah. Dasar yang kedua menegaskan bahwa setiap orang harus mampu mengubah hal-hal yang dapat diubah dan belajar menerima hal-hal yang tidak dapat diubah (Darmawan, 2019). Dasar yang ketiga yaitu setiap orang harus mensyukuri kebenaran bahwa dirinya diciptakan oleh Allah SWT dengan alasan tertentu. Manusia harus memiliki pandangan yang adil dan seimbang tentang diri sendiri. Manusia tidak boleh memandang rendah diri sendiri, karena hal ini dapat mempersulit diri untuk memperoleh banyak teman.

Prasangka menjadi salah satu awal terjadinya suatu konflik. Prasangka berarti memutuskan atau menghukum seseorang sebelum mengetahui fakta yang sebenarnya (Kasriadi, 2018). Inti dari prinsip perdamaian yang berkaitan dengan prasangka yaitu setiap orang perlu belajar untuk melihat orang lain sebagai individu. Manusia

tidak boleh dinilai baik atau buruk, pintar atau bodoh, kaya atau miskin hanya berdasarkan suku, agama, dan status sosial.

Perbedaan etnis merupakan isu identitas yang terjadi pada beberapa kasus, seperti perbedaan warna kulit, bentuk mata, atau rambut menjadi suatu masalah yang menimbulkan kesenjangan antar kelompok. Kesenjangan tersebut terlihat ketika masing-masing kelompok merasa lebih unggul daripada kelompok lain. Prinsip penting dalam perdamaian yaitu menghindari kecenderungan untuk berprasangka baru terhadap suku lain serta berusaha untuk memahami dan menikmati perbedaan.

Perbedaan agama menjadi salah satu penyebab adanya konflik di Indonesia. Masyarakat belum cukup mampu untuk menerima adanya perbedaan, termasuk perbedaan dalam aspek keagamaan. Kesadaran akan keberagaman agama sangat diperlukan dalam upaya mewujudkan perdamaian (Lincoln & Amalee, 2017). Manusia tidak dapat dipaksa untuk memeluk agama tertentu, karena hal ini berkaitan dengan kerelaan diri untuk menganut suatu agama.

Perbedaan jenis kelamin memiliki dua prinsip penting, yang pertama menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan oleh Allah SWT secara sepadan, sehingga harus saling memperlakukan dengan adil. Prinsip yang kedua menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan harus menghormati hak orang lain (Darmawan, 2019). Laki-laki tidak boleh melakukan pelecehan, diskriminasi, dan intimidasi dengan menggunakan fisik atau lisan. Perempuan tidak boleh memperlakukan laki-laki, membeda-bedakan teman berdasarkan jenis kelamin, serta tidak boleh menyakiti dengan kata-kata.

Perbedaan status ekonomi memiliki tiga hal penting yang perlu diperhatikan. Manusia tidak boleh menghargai seseorang berdasarkan harta, karena hidup seseorang tidak bergantung pada harta yang dimiliki. Godaan yang dihadapi orang kaya atau miskin pada dasarnya sama, yaitu kesombongan, penindasan, keserakahan, kurang bergantung pada Tuhan, iri hati, dan suka mengkritik (Arslan, Alabay, & Polat, 2015). Manusia perlu bergaul dengan orang yang berasal dari semua tingkat ekonomi, agar mampu memahami arti kehidupan.

Eksklusivitas kelompok merupakan salah satu sumber terjadinya suatu konflik.

Kesadaran bahwa kelompok eksklusif dapat menyakiti orang lain dan menimbulkan banyak kerugian diperlukan untuk mewujudkan suatu perdamaian. Kelompok eksklusif dapat menyebabkan timbulnya batasan yang sempit, tidak harmonisnya hubungan antara orang satu dengan yang lain, serta memicu terjadinya perselisihan yang menimbulkan kerugian (Astuti, 2015). Pergaulan dalam kelompok eksklusif mendorong seseorang untuk menyisihkan orang lain yang berbeda suku, agama, bahasa, dan ras.

Nilai dasar perdamaian lebih menekankan pada aspek pemahaman terhadap keberagaman. Tuhan telah menciptakan keberagaman agar dunia menjadi lebih indah, dengan demikian perbedaan harus dijadikan sebagai aspek untuk saling melengkapi. Keberagaman perlu dianggap sebagai suatu keniscayaan, bukan sebagai topik yang harus diperdebatkan (Khokhar, 2017). Kesadaran terhadap keberagaman perlu ditanamkan dalam diri masing-masing individu agar mampu menumbuhkan komitmen untuk saling menghargai satu sama lain.

Inti pembelajaran dari nilai memahami konflik, yaitu kesadaran bahwa konflik pasti akan terjadi dan dialami oleh setiap orang. Konflik merupakan kesempatan untuk menjadi lebih dewasa, karena konflik harus diselesaikan dengan cerdas agar tidak merusak hubungan antar individu (Mardhiah, 2020). Penyelesaian suatu konflik perlu mempertimbangkan akibat yang akan ditimbulkan. Konflik merupakan situasi yang dapat menjerumuskan seseorang pada tindakan ekstrem yang tidak sehat.

Nilai menolak kekerasan perlu dibangun dan ditingkatkan dengan alasan dapat menimbulkan tiga dampak buruk bagi diri sendiri dan orang lain. Kekerasan dapat menimbulkan kekacauan dan menyebabkan timbulnya kekerasan yang lebih banyak lagi. Kekerasan akan menciptakan situasi yang tidak terkendali, sehingga menimbulkan kerusakan dan kesakitan (Siregar, 2013). Kehilangan kesempatan untuk berdamai menyebabkan suatu masalah dapat menjadi semakin besar dan semakin parah (Sa'diyah, 2021). Perasaan tidak baik pada orang yang terjebak dalam kekerasan akan dipenuhi dengan perasaan takut, bersalah, dan dendam.

Prinsip penting dari nilai meminta maaf yaitu penyelesaian suatu konflik berdasarkan kesadaran untuk melihat kesalahan pada diri sendiri. Tidak ada konflik yang terjadi secara

sepihak, karena konflik selalu melibatkan lebih dari satu pihak (Mardhiah, 2020). Konflik dapat diselesaikan apabila salah satu pihak bersedia untuk mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada pihak lain.

Pemberian maaf merupakan nilai penting untuk menciptakan suatu perdamaian. Pemberian maaf menjadi keputusan yang dapat membuka jalan untuk perdamaian. Prinsip penting dalam nilai perdamaian yaitu memaafkan tidak harus menunggu merasa enak hati, karena memaafkan pada saat diri kecewa akan lebih mulia dibandingkan keadaan biasa. Pemberian maaf berarti memperbaiki kenyataan, bukan menimbun atau menghindari kenyataan (Astuti, 2015). Pemberian maaf tidak berarti bahwa tidak ada masalah atau menganggap kesalahan dengan tidak ada masalah (Nurwanto & Habiby, 2020). Pemberian maaf merupakan langkah awal untuk menyelesaikan masalah dan meringankan beban perasaan. Pemberian maaf tidak memiliki batas waktu dan tempat, hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya masalah baru.

Pembelajaran nilai-nilai dasar perdamaian pada mata pelajaran PPKn telah dilaksanakan di beberapa SMP. Pembelajaran nilai-nilai dasar perdamaian telah termuat dalam buku yang digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan pembelajaran. Kenyataan dalam praktiknya terdapat beberapa guru yang belum mengetahui bahwa nilai-nilai yang selama ini diterapkan dalam pembelajaran termasuk dalam dua belas nilai dasar perdamaian (Mardhiah, 2016). Guru telah mengimplementasikan nilai-nilai dasar perdamaian, walaupun belum secara menyeluruh dan terstruktur. Guru selalu mendiskusikan hal-hal pokok terkait definisi, cara, dan sikap yang perlu dimiliki untuk diterapkan di lingkungan sekolah. Penanaman nilai-nilai dasar perdamaian dalam diri siswa bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kekerasan di sekolah. Penanaman nilai-nilai dasar perdamaian dilakukan dengan memberikan materi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari.

Pembelajaran nilai-nilai dasar perdamaian pada hakikatnya merupakan suatu hal yang penting dan perlu memperoleh perhatian khusus sebagai langkah terciptanya perdamaian, baik di lingkungan sekolah, masyarakat, negara, atau dunia. Pembelajaran PPKn merupakan salah satu mata pelajaran pokok di sekolah yang

bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan warga negara dalam dimensi spiritual, emosional, dan sosial. Pembelajaran PPKn menjadi sarana untuk mengembangkan tanggung jawab sebagai warga negara, serta mengembangkan siswa agar mampu berpartisipasi sebagai warga negara yang baik

### **Implementasi Nilai-Nilai Dasar Perdamaian dalam Pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Hambatannya**

Guru mempunyai peranan penting dalam upaya peningkatan pelaksanaan pendidikan di sekolah. Guru dituntut untuk meningkatkan dan mengembangkan diri, baik ilmu pengetahuan, keterampilan, maupun kesiapan mental untuk mengajar. Guru harus mampu mengelola proses pembelajaran yang menekankan keterlibatan siswa secara optimal, dengan menggunakan berbagai metode mengajar yang mampu meningkatkan motivasi belajar siswa (Murtiningsih & Komalasari, 2017). Guru melaksanakan berbagai upaya untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Keberhasilan guru dalam menyampaikan materi kepada siswa dipengaruhi oleh strategi pembelajaran yang diterapkan.

Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan termasuk penggunaan metode pembelajaran, model pembelajaran, serta pemanfaatan berbagai sumber daya dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Model pembelajaran harus berorientasi pada tujuan pembelajaran yang akan dicapai (Laili, Dayati, & Rochmadi, 2021). Guru berperan sebagai fasilitator yaitu membimbing siswa untuk belajar serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi siswa. Implementasi nilai-nilai dasar perdamaian membutuhkan pemahaman secara komprehensif dan holistik terkait beberapa aspek pendidikan, yaitu afektif, kognitif dan psikomotorik (Nurfalah, 2019). Pendidikan perdamaian lebih menitikberatkan pada sikap toleransi untuk menghargai perbedaan dalam diri masing-masing siswa.

Guru harus menanamkan dan menerapkan nilai dasar perdamaian dalam diri sendiri sebelum mengaplikasikannya ke dalam materi pembelajaran. Nilai dasar perdamaian sebagian telah termuat dalam materi pembelajaran yang terdapat di kelas VII dan IX seperti materi tentang keanekaragaman yang meliputi perbedaan etnis, agama, jenis kelamin, dan status ekonomi. Guru

perlu menyampaikan nilai-nilai dasar perdamaian yang belum termuat dalam materi pembelajaran dengan menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) untuk mengaitkan nilai tersebut dengan materi yang diajarkan.

Guru menjadi teladan bagi siswa dalam proses implementasi nilai-nilai dasar perdamaian. Pendidikan merupakan usaha untuk membantu perkembangan potensi dan kemampuan siswa sebagai seorang individu, masyarakat, atau warga negara. Implementasi nilai-nilai dasar perdamaian dapat terlaksana secara efektif apabila guru mampu menyajikan beberapa persoalan faktual dalam proses pembelajaran. Siswa diharapkan dapat menerapkan nilai-nilai dasar perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan perdamaian diartikan sebagai upaya mentransformasikan diri seseorang dengan membangun kesadaran dan pemahaman, mengembangkan keprihatinan, serta aksi sosial (Sa'diyah & Nurhayati, 2019). Pendidikan perdamaian bertujuan untuk menciptakan kondisi dan sistem anti kekerasan, berkeadilan, dan peduli lingkungan. Hal ini tentu berkaitan dengan teori *behaviorisme* yang menyatakan bahwa pengalaman belajar manusia diperoleh dari lingkungan, sehingga lingkungan merupakan faktor pembentuk perilaku manusia.

Pembelajaran dilakukan sebagai upaya menanamkan nilai-nilai dasar perdamaian dalam diri siswa. Guru dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar perdamaian dalam pembelajaran sebagian besar masih menggunakan metode ceramah dan diskusi. Model pembelajaran kooperatif menjadi salah satu strategi belajar untuk menanamkan nilai-nilai dasar perdamaian pada siswa. Model ini dilaksanakan dengan membagi sejumlah siswa menjadi beberapa kelompok kecil untuk saling bekerja sama dalam menyelesaikan tugas. Model lain yang dapat digunakan yaitu model pembelajaran berbasis masalah atau *problem based learning*, yang menuntut siswa untuk saling membantu dalam memahami masalah sebagai kunci dari proses pembelajaran. Guru harus mampu memodifikasi bahan ajar dan media pembelajaran yang digunakan agar nilai-nilai dasar perdamaian dapat diterima dengan baik oleh siswa.

Penggunaan model pembelajaran yang berkualitas dapat mempengaruhi tinggi rendahnya hasil belajar siswa. Siswa harus terlibat secara

langsung dan dituntut untuk aktif dalam pembelajaran untuk menunjang peningkatan hasil belajar siswa. Upaya implementasi nilai-nilai dasar perdamaian dalam pembelajaran dinilai efektif apabila siswa mampu memahami dan menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari (Mardhiah, 2016). Implementasi tidak hanya berupa aktivitas, tetapi meliputi kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

Hambatan yang sering ditemukan pada pelaksanaan nilai-nilai dasar perdamaian yaitu ketika sebagian siswa cenderung pasif dalam pembelajaran materi-materi tertentu, karena materi tersebut dinilai kurang menarik untuk siswa. Hambatan yang dihadapi yaitu permasalahan khusus dalam proses pembelajaran terkait kemampuan siswa untuk memahami secara mendalam nilai-nilai dasar perdamaian (Mardhiah, 2016). Hal ini dapat berpengaruh terhadap pencapaian dari tujuan pembelajaran. Proses pembelajaran yang dilakukan secara seimbang dan utuh sangat dibutuhkan agar pembelajaran dapat berlangsung secara aktif, kreatif, efektif, dan terasa lebih menyenangkan.

Permasalahan umum yang menjadi hambatan dalam implementasi nilai-nilai dasar perdamaian pada pembelajaran yaitu kurangnya sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam proses belajar mengajar. Guru ketika mengajar hanya menggunakan spidol dan papan tulis untuk menyampaikan materi pembelajaran. Siswa terkesan hanya menyalin tulisan yang ada di papan tulis tanpa mengerti maksud dari tulisan tersebut. Guru yang tidak memiliki buku pegangan tentang nilai dasar perdamaian untuk pembelajaran PPKn juga menjadi hambatan dalam mengimplementasikan nilai-nilai dasar perdamaian pada siswa.

## SIMPULAN

Konsep dasar pendidikan perdamaian terdiri atas dua belas nilai, yaitu: (a) menerima diri sendiri, (b) prasangka, (c) perbedaan etnis, (d) perbedaan agama, (e) perbedaan jenis kelamin, (f) perbedaan status ekonomi, (g) perbedaan kelompok, (h) keanekaragaman, (i) konflik, (j) menolak kekerasan, (k) mengakui kesalahan, (l) memberi maaf. Implementasi nilai-nilai dasar perdamaian dalam pembelajaran dilakukan

dengan memodifikasi Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), model, media, dan bahan ajar sesuai dengan realita atau bersifat faktual.

Hambatan dalam implementasi nilai-nilai dasar perdamaian pada pembelajaran yaitu berkaitan dengan kemampuan guru dalam memahami nilai-nilai dasar perdamaian, rendahnya minat belajar siswa, serta kurangnya sarana dan prasarana sebagai penunjang proses pembelajaran.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Arslan, Y., Alabay, G. G., & Polat, S. (2015). The Impact of Peace Education Programme at University on University Students' Intercultural Sensitivity. *Social and Behavioral Sciences*, 174(2015), 2301-2307.
- Astuti, E. Y. (2015). *Peran Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pencegahan Perilaku Menyimpang Siswa di SMK Ma'arif Bobotsari Kabupaten Purbalingga Tahun 2014-2015*. Purwokerto: Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- Darmawan, I. P. A. (2019). Pendidikan Perdamaian dengan 12 Nilai Dasar Perdamaian. *Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual*, 2(1), 55-71.
- Emzir. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasriadi. (2018). *Penerapan 12 Nilai Dasar Perdamaian Organisasi Mahabbah Institute for Peace and Goodness (Islam dan Kristen)*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Kemendiknas. (2011). *Panduan Pelaksanaan Pendidikan Karakter*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan Perbukuan.
- Khokhar, N. (2017). Need of Peace Education in Teacher Training Programmes. *Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies*, 4(37), 8782-8789.
- Laili, I., Dayati, U., & Rochmadi, N. W. (2021). Penerapan Model Pembelajaran Teams Games Tournament Berbasis Ranking One Civic Education untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 120-128.
- Lincoln, E., & Amalee, I. (2017). *12 Nilai Dasar Perdamaian*. Bandung: Pelangi Mizan.
- Mardhiah, A. (2016). *Implementasi Pendidikan Damai di Madrasah Aliyah Negeri Rukoh Kota Banda Aceh*. Tangerang Selatan: Cinta Buku Media.
- Mardhiah, A. (2020). *Pendidikan Damai di Daerah Rawan Konflik*. Banda Aceh: Bambu Kuning Utama.
- Matnuh, H., & Adawiah, R. (2020). Persepsi Guru Pendidikan dan Kewarganegaraan tentang Pendekatan Saintifik. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(1), 86-100.
- Murtiningsih, I., & Komalasari, K. (2017). Implementasi Model Learning Together untuk Meningkatkan Kecakapan Kewarganegaraan Siswa Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(2), 98-107.
- Nurfalah, Y. (2019). Pendidikan Damai Alternatif Pendidikan Korban Konflik Komunitas Syi'ah Sampang Madura. *Jurnal Pemikiran Keislaman*, 30(1), 85-114.
- Nurwanto, & Habiby, W. N. (2020). Penyemaian Sikap Hidup Damai di Sekolah: Tinjauan Pendidikan Perdamaian dan Multi-Dimensi Kurikulum. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 10(1), 1-11.
- Sa'diyah, H., & Nurhayati, S. (2019). Pendidikan Perdamaian Perspektif Gus Dur: Kajian Filosofis Pemikiran Pendidikan Gus Dur. *Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2), 175-188.
- Sa'diyah, H. (2021). Kekerasan dalam Pendidikan: Sejarah, Perkembangan dan Solusi. *Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, 11(1), 70-86.
- Siregar, L. Y. S. (2013). Kekerasan dalam Pendidikan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Pendidikan dan Sains*, 1(1), 51-61.